

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN E-BOOK

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Kabupaten Semarang Dalam Angka 2018*, (Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2018*, (Semarang : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018).
- BAPPENAS RI, *Strategi Nasional Akses Pada Keadilan 2016-2019*, (Jakarta : Sekretariat Negara, 2016).
- Direktorat Pencatatan Sipil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, *Materi Bimbingan Teknis Aparatur Daerah Dalam Rangka Pelayanan Pencatatan Sipil Tahun 2019*, (2019).
- Eddyono, Supriyadi W, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta : ELSAM, 2005).
- Equitas, *International Centre for Human Rights Education*, (Montréal, 2008).
- Firgiani, Agustin, *Kajian Teori dan Analisis Hak Asasi Manusia dan Human Trafficking*, (Purwokerto : Bebook Publisher, 2015).
- Pasaribu, Rowland B.F. *Bahan ajar mata kuliah Kewarganegaraan*, Universitas Gunadarma, Depok, Bab III.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984).
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015).
- Smith, Rhona K. M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2001).
- Sunner, Cate, IALDF, *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, (Yogyakarta, 2010).

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

- Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948 atau *Universal Declaration of Human Rights*.
- Konvenan Hak Anak atau *Convention on The Rights of the Child*.

Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

PERATURAN DAERAH

Peraturan Bupati Semarang Nomor 39 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Aris, P., *Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Dini Melalui Aktivitas Bermain*, Jurnal Ilmiah Guru ("COPE", No. 02/Tahun XVIII/November, 2014.)

Dr. Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutannya*, (Naskah Akademis, 2006.)

Fatinah, Azizah Farah, *Implementasi Kewajiban Negara Memenuhi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat*, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2017).

Haryanto, Tenang dkk, *Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Jurnal Dinamika Hukum (Vol.8 No.2 Mei 2008).

Kingsbury & Scanzoni, 1993.

Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Peundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Yuridika, (Vol.32, No.1, 2017).

- Rifki, Muhammad, *Eksekusi Mati Terhadap Orang Yang Menderita Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum*, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).
- Samekto, FX. Adji, *Kajian Sosio Legal dan Paradigma dalam Penelitian Hukum*, Seminar Penulisan Hukum, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2016)
- Simatupang, Taufik H., *Pemihakan Dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Forum Ilmiah (Volume 8 Nomor 1, 2011)
- Suharto, Febry Hizba Ahshaina, *Interaksi di Dalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Panti Sosial Masurdi Putra Bambu Apus Jakarta*, Jurnal Share Social Work, (2015).
- Universitas Jember, *Perlindungan Hukum Pada Pemenuhan Hak Anak Atas Akta Kelahiran*, Jurnal Rechtsens, (Vol. 3, No. 1, 2014).
- Yenny AS., *Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Ana*. Jurnal Hukum Media Bhakti, (2017).

WEBSITE

- Astuti, Indriyani, 2019, *Ini 3 Provinsi dengan Angka Kepemilikan Akta Kelahiran Terendah*. <http://mediaindonesia.com/read/detail/209058-ini-3-provinsi-dengan-angka-kepemilikan-akta-kelahiran-rendah>. Diakses Pada 25 April 2019.
- Badan Pusat Statistik, *Konsep Penduduk Miskin*, dalam <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses Pada 22 Mei 2019.
- BBC News Indonesia, 2018, *Empat hal di balik angka kemiskinan Indonesia yang disebut mencatat sejarah*, dalam <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44861258>. Diakses Pada 22 Mei 2019.
- BULOG, *Sekilas Raskin*, Dalam http://www.bulog.co.id/sekilas_Raskin.php. Diakses Pada 25 April 2019.
- Jaminan Sosial Indonesia, *Regulasi Jamkesmas*, dalam <http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/regulasi>. Diakses Pada 25 April 2019.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, *Evaluasi Program Raskin dan Sosialisasi Program Bantuan Pangan*, dalam <https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/evaluasi-program-raskin-dan-sosialisasi-program-bantuan-pangan>. Diakses Pada 25 April 2019.

- Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Program Keluarga Harapan*, dalam <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>. Diakses pada 25 April 2019.
- Kusumawati, Utami Diah, CNN Indonesia., 2015, *Dana Bantuan Siswa Miskin Rp. 2,9 T Tak Sampai ke Murid*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151009124222-12-83921/audit-dana-bantuan-siswa-miskin-rp29-t-tak-sampai-ke-murid>. Diakses Pada 8 Januari 2019.
- Nupus, Hayati, 2019, *Jutaan Anak Indonesia belum Memiliki Akta Kelahiran*, dalam <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jutaan-anak-indonesia-belum-memiliki-akte-kelahiran/1358856>. Diakses Pada 25 April 2019.
- Presiden Republik Indonesia, 2017, *Mensos: Subsidi Rastra Berhijrah ke BPNT dan Bansos Rastra*, dalam <http://presidenri.go.id/info-kementrian-lembaga/mensos-subsidi-rastra-berhijrah-ke-bpnt-dan-bansos-rastra.html>. Diakses Pada 25 April 2019.
- Putri, Aditya Widya, 2017, *Memberikan Hak Anak Lewat Akta Kelahiran*, dalam <https://amp.tirto.id/memberikan-hak-anak-lewat-akta-kelahiran-chrc>. Diakses Pada 25 April 2019.
- Rahayu, Srikandi, 2018, *Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya*, dalam <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/03/pengertian-bantuan-langsung-tunai-serta-keuntungan-kelemahan.html>. Diakses Pada 25 April 2019.
- Ramadhan, Adhitya, 2012, *Betapa Sengsaranya Tidak Punya KTP*, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/01/09/09010652/Betapa.Sengsaranya.Tidak.Punya.KTP>. Diakses Pada 11 Oktober 2017.
- Setyawan David, KPAI, 2017, *Pemerintah Masih Memiliki Tanggung Jawab Akta Lahir Sampai 2019*, dalam <http://www.kpai.go.id/berita/pemerintah-masih-memiliki-tanggung-jawab-akta-lahir-sampai-2019>. Diakses Pada 22 Maret 2018.
- Setyawan, David, KPAI, 2014, *Pemenuhan Hak Anak Atas Akta kelahiran Merupakan Bagian Dari Hak Sipil Yang Harus Dilindungi Konstitusi*, dalam <http://www.kpai.go.id/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi/>. Diakses Pada 22 Maret 2018.
- Yumiyanti, Iin, *Bukan BLT Tapi Padat Karya Cash, Solusi Jokowi Katrol Daya Beli*, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3706355/bukan-blt-tapi-padat-karya-cash-solusi-jokowi-katrol-daya-beli>. Diakses Pada 25 April 2019.

WAWANCARA

Suroso, SH. Kepala Sie Bidang Pencatatan Akta kelahiran dan Kematian kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2018, Wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 8 Mei 2018.

Suroso, SH. Kepala Sie Bidang Pencatatan Akta kelahiran dan Kematian kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, 2019, Wawancara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Mei 2019.